



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 247/MENKES/SK/VIII/2012

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEDELAPAN
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kedelapan Tahun 2012 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;

15. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

22. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor: 9880/H11.1.17/TU/2011 tertanggal 26 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Hasil Seleksi Akademik PPDS-BK Gelombang VII tahun 2011 Kemenkes;
 2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor: 11467/H16.2/PP/PPDS/V/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Laporan Hasil Seleksi Peserta PPDS-BK Fak. Kedokteran Unand Periode Januari 2012;
 3. Surat Ketua Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Nomor 2230/DN/P3S/2011 tertanggal 23 Juni 2011 perihal Penerimaan dan Penolakan PPDSBK Tahap VI di FK UNAND;
 4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor: 518/UN9.1.4.1/PP/2011 tanggal 25 Nopember 2011 perihal Daftar nama Calon Peserta PPDS yang lulus seleksi akademik;
 5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor: 587/UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Tunda Masuk Calon PPDS-BK;
 6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor: 022/UN9.1.4.1/PPDS/PP/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal Daftar Nama Calon PPDS-BK yang masuk bulan Januari 2012;
 7. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor: 16247A/H.F1.D/PDP.00.01/2011 tertanggal 5 Desember 2011 perihal SK Rektor UI;

8. Surat Dekan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Nomor: 6986/UN6.C/PP/2011 tertanggal 14 Desember 2011 perihal Penetapan Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang II Tahun 2011 (Periode Maret 2012) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran;
9. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor: 6992/UN27.06/PP/2011 tertanggal 30 November 2011 perihal Penerimaan Mahasiswa PPDSBK KEMENKES;
10. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 5095/UN7.3.4//D/PP/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Hasil Test Calon PPDS FK Undip Semarang;
11. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 6288/UN7.3.4/D/PP/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Penerimaan Peserta PPDS-BK Kemenkes;
12. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor: 11444/ UN10.7/AK/2011 tertanggal 2 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PPDS BK;
13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18976/H4/PP.36/ 2011 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Periode Januari 2012;
14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor: 559/H4.7/PP.17/2012 tertanggal 24 Januari 2012 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi di Lingkungan Depkes Periode Januari 2012;

11. MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEDELAPAN TAHUN 2012.
- KESATU : Daftar nama penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan, dan diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2012.
- KETIGA : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Pertahanan di Jakarta
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
8. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
12. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta
13. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta
14. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan di Jakarta;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta
17. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di tempat
18. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta
19. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta
20. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta
21. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia
22. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia
23. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia
24. Ketua Umum PB IDI di Jakarta
25. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta
26. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta
27. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KEDELAPAN TAHUN 2012
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPPT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I LULUS SELEKSI AKADEMIK													
1	dr. Benny Gunawan	Jakarta, 12 September 1984	24.1.0050665	PTT		PKM Limarahing	Dinkes Kab. Alor	NTT	Ilmu Bedah	Januari 2012	I	RSUD Kab. Alor	
2	dr. Finni Arifiana	Jakarta, 9 April 1981	198194942006042008	PNSD	Pemprov Jambi	RSUD Kol. Abundjani Bangko	Dinkes Prov. Jambi	JAMBI	Ilmu Kes. Anak	Januari 2012	I	RSUD Kol. Abundjani Bangko	
3	dr. Triswi Widyanti Mugi R	Karanganyar, 29 Maret 1975	197503292006042005	PNSD	Pemkot Surakarta	PKM Penumping	Dinkes Kota Surakarta	JATENG	Ilmu Kes. Anak	Januari 2012	I	RSUD Kota Surakarta	
4	dr. Budhi Hami Seno	Cilacap, 1 Januari 1969	196901012007011048	PNSD	Pemkot Surakarta	RSUD Dr. Moewardi	Dinkes Kota Surakarta	JATENG	Ilmu Kes. Jiwa	Januari 2012	I	RSUD Dr. Moewardi	
5	dr. Monna Octavia Rahmawaty	Jakarta, 29 Oktober 1985	198510292011012006	PNSD	Pemprov Bengkulu	PKM Kembang Seri	Dinkes Prov. Bengkulu	BENGGULU	Ilmu Kes. THT-KL	Januari 2012	I	RSUD Prov. Bengkulu	
6	dr. Yunita Lidiana Sinaga	Singkawang, 29 Juni 1983	198306292008032004	PNSD	Pemkab Singkawang Barat	PKM Kab. Singkawang Barat	Dinkes Kab. Singkawang Barat	KALBAR	Ilmu Kes. THT-KL	Januari 2012	I	RSUD Kab. Singkawang Barat	
7	dr. Tri Hadi Susanto	Bengkulu, 14 September 1984	19840914201101000	PNSD	Pemkab Bengkulu Tengah	PKM SriKuncoro	Dinkes Kab. Bengkulu Tengah	BENGGULU	Ilmu Peny. Dalam	Januari 2012	I	RSUD Kab. Bengkulu Tengah	
8	dr. Prima Kartika Sari	Semarang, 19 Juni 1983	198306192009032008	PNSD	Pemkab Magelang	BKPM Magelang	Dinkes Kab. Magelang	JATENG	Ilmu Peny. Paru	Januari 2012	I	BKPM Magelang	
9	dr. Kiki Widyastuti	Tanjung Enim, 19 Oktober 1983	198310192009032003	CPNSD	Pemkab Muara Enim	PKM Tanjung Agung	Dinkes Kab. Muara Enim	SUMSEL	Ilmu Peny. Paru	Januari 2012	I	RSUD Muara Enim	
10	dr. Retno Tunjungsari	Banjarnegara, 20 Mei 1982	-	Non PNS		RSUD Kab. Klaten	Dinkes Kab. Klaten	JATENG	Ilmu Peny. Saraf	Januari 2012	I	RSUD Kab. Klaten	
11	dr. Ika Wiraswesty Ciptaningdah	Ambon, 21 Juli 1981	25.1.0044967	PTT		PKM Perawatan Hila	Dinkes Prov. Maluku	MALUKU	Obstetri & Ginekologi	Januari 2012	I	RSUD Prov. Maluku	
II RESIDEN													
12	dr. Alexander Indra H	Jakarta, 27 September 1977	11060000500977	TNI	Kostrad	Ditkesad	KEMHAN	KEMHAN	Obstetri & Ginekologi	Juli 2011	II	Ditkesad	
13	dr. Dyah Widiastuti	Tangerang, 25 Agustus 1976	530432	TNI	Lanud ATS	Diskesau	KEMHAN	KEMHAN	Patologi Klinik	Januari 2012	I	Diskesau	

